

# **ANALISA YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERIBANGIL NOMOR : 366 / Pid. B/ 2006/ PN. Kab. Pas. Bgl TENTANG TINDAKPIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA HM. AEDYLLAH EDYSANTOSO BIN SUMARNO**

**Oleh: FARIET BAGUS WIHANDOYO ( 05400156 )**

law

Dibuat: 2010-02-12 , dengan 2 file(s).

**Keywords:** Kata Kunci : Analisa, Putusan Hakim, Tindak Pidana Korupsi

## **ABSTRAKSI**

Obyek studi dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai putusan hakim tentang tidak pidana korupsi, dimana terdakwa yaitu HM. Aedyllah Edy Santoso Bin Sumarno diputus bebas oleh hakim. Pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 366 / Pid. B/ 2006/ PN. Kab. Pas. Bgl tentang tindak pidana korupsi dengan terdakwa HM. Aedyllah Edy Santoso Bin Sumarno Penulis menemukan permasalahan ditinjau dari aspek kepastian hukum baik formil maupu materiil, aspek keadilan bagi terdakwa dan masyarakat, dan aspek kemanfaatan. Adanya kelalaian dalam pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum yang dinilai hakim tidak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP berakibat dakwaan batal demi hukum sehingga terdakwa dibebaskan. Penelitian ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Jenis bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, yakni; Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 366 / Pid. B/ 2006/ PN. Kab. Pas. Bgl. Selanjutnya mengenai bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, yaitu diantaranya adalah KUHAP, KUHP, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Serta bahan hukum tersier yakni ; buku-buku, jurnal, majalah, internet, artikel kamus dan Ensiklopedi. Berdasarkan analisa penulis bahwa dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 366 / Pid. B/ 2006/ PN. Kab. Pas. Bgl ditinjau dari aspek kepastian hukum formil belum memenuhi ketentuan yang diatur pada pasal 197 ayat (1) KUHAP, karena ada beberapa poin yang dicantumkan namun kurang lengkap dan bahkan ada ketentuan yang tidak dicantumkan sama sekali, terlebih lagi aspek materiilnya pada putusan tersebut tidak sesuai dengan pasal 143 ayat (2) KUHAP, karena terdapat ketidak cermatan dalam membuat surat dakwaan. Pada aspek keadilan untuk terdakwa dan masyarakat dalam putusan ini belum terpenuhi, karena hakim lebih mengutamakan aspek kepastian hukum dibandingkan dengan aspek keadilan. Sedangkan aspek kemanfaatannya dalam putusan ini juga belum terpenuhi karena tidak ada efek jera dan suatu penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, masyarakat juga merasa tidak mendapatkan kepuasan terhadap kinerja aparat penegek hokum atas kinerjanya khususnya dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum. .

## **ABSTRAC**

Study object in writing of this thesis is about judge decision about not corruption crime, where its defendant is H.M. Aedyllah Edy Santoso bin Sumarno broken to be free by judge. At judge of district court, decision Bangil No: 366/Pid. B/2006/PN Sub-Province Pasuruan-Bangil about corruption crime with defendant H.M. Aedyllah Edy Santoso bin Sumarno, researcher finds problems evaluated from rule of law aspect both formal and material, justice aspect for defendant and public and efficacy aspect. Existence of negligence in making of assertion letter by public prosecutor assessed by judge unmatched to arranged in section 143 sentences (2) KUHAP causes assertion of cancellation for the shake of law so that defendant is freed. This research applies writing method of yuridis normative. Law material type

applied is primary law material, namely judge of district court decision Bangil No: 366/Pid. B/2006/PN Sub-Province Pasuruan-Bangil. Hereinafter about secondary law material is law material that is supporting primary law material, among others KUHAP, KUHP, and judicial power law, and tertiary law material namely books, journal, magazine, internet, dictionary article and encyclopedia. Based on writer analysis that in judge of district court decision Bangil No: 366/Pid. B/2006/PN Sub-Province Pasuruan-Bangil, evaluated from formal rule of law aspect has not pursuant to arranged at section 197 sentences (1) KUHAP. There are some point mentioned but less completely and even there are rule that is not is mentioned at all, particularly its material aspect at the decision unmatched to section 143 sentences (2) KUHAP because there is un-accuracy in making assertion letter. At justice, aspect for defendant and public in this decision has not fulfilled, because judge is more majoring is rule of law aspect compared to justice aspect. While its efficacy aspect in this decision also has not fulfilled for absence of effect to discourage and a regret to deed which has been done defendant, public also feels not to get satisfaction to law enforcer government officer performance to its performance is especially in this case is public prosecutor.